TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Irhanisa ⁽¹⁾, Umar Mahdi ⁽²⁾, Al-Muttaqien ⁽³⁾

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

irhanisa@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², al-muttaqien@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: suhaibah@unigha.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan baru. Salah satunya merupakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik yang memanfaatkan internet sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi kejahatannya. Permasalahan dengan munculnya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) yang termasuk dalam kategori tindak pidana baru, pada proses tahapan pembuktian dibutuhkan adanya alat bukti. Namun dengan adanya perluasan tentang alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebutkan bahwa adanya alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yaitu terpenuhinya unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Alat bukti elektronik dari kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik terhadap putusan No.82/Pid.Sus/2022/PN Sgi menggunakan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri serta didukung dengan alat bukti lainnya dalam KUHAP agar memenuhi syarat sah dalam sistem pembuktian yang digunakan yaitu dengan minimal 2(dua) alat bukti. Untuk meminimalisir kejahatan *Cyber Sex*, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, di antaranya: Penyusunan undang-undang yang ketat, Pembentukan tim penegak hukum, Peningkatan kesadaran masyarakat, Pembatasan akses, dan Pelaporan dan tindakan cepat.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembuktian, Pidana Kesusilaan, dan Media Elektronik

Abstract

The problem that arises as a result of the development of information technology is the birth of new crimes. One of them is a decency crime committed through electronic media that utilizes the internet as a tool in carrying out its criminal actions. The problem with the emergence of a decency crime through electronic media (cyber sex) which is included in the category of a new crime, in the process of proof stages requires evidence. However, with the expansion of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), it is stated that there is evidence of electronic information or electronic documents and/or printouts. The research method used in this research is normative legal research. The basis for the juridical considerations by the judge is the fulfillment of the act charged with in Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions, namely the fulfillment of the element of Everyone intentionally and without rights distributing and/or transmitting and/or making Electronic Information and/or Electronic Documents accessible that have content that violates decency. Electronic evidence from cases of criminal acts of decency through electronic media against decisions No.82/Pid.Sus/2022/PN Sgi uses electronic evidence that stands alone and is supported by other evidence in the Criminal Procedure Code so that it fulfills the legal requirements in the evidentiary system used, namely with at least 2 (two) pieces of evidence. To minimize Cyber Sex crimes, the Indonesian government has made several efforts, including: Drafting strict laws, Forming a law enforcement team, Increasing public awareness, Restricting access, and Reporting and fast action.

Keywords: Juridical Review, Evidence, Criminal Decency, and Electronic Media

Pendahuluan

Berbagai macam dampak perkembangan teknologi digital, bahkan dalam pemanfaatan internet yang bukan hanya dapat memberikan kemudahan saja bagi manusia, pada kenyataan yang ada internet juga telah berubah wujud dalam bentuk kejahatan baru, ahli bidang hukum

mengklasifikasikan kejahatan tersebut dengan istilah *cyber crime*.¹ Kekhawatiran yang timbul terhadap kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi disebabkan karena perkembangan modus operandi terhadap tindak pidana. Berbagai kejahatan dapat dengan mudah dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya, pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data penting perusahaan dan tindakan kejahatan penipuan melalui media elektronik.² Landasan yuridis perkembangan modus operandi terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan baru. Salah satunya merupakan kejahatan kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik yang memanfaatkan internet sebagai alat bantu dalam menjalankan aksi kejahatannya. KUHP secara normatif membagi delik kesusilaan menjadi 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu: kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai dengan 303 Bab XIV dan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 532 sampai dengan 547 Bab VI Buku III. Dari berbagai perumusan tindak pidana kesusilaan dapat diamati bahwa perumusan delik dalam pasal-pasal tersebut yang mendekati dan dapat digunakan untuk menjangkau kejahatan penyalahgunaan internet dengan tujuan seksual, yaitu: *Cyber porn*, *Cyber sex*, *cyber prostitution* dan *Virtual adultery*.³

Menurut Barda Nawawi Arif, *cyber sex* adalah penggunaan internet untuk tujuan seksual.⁴ *Cyber sex* terkait dengan sex, jasa, dan aktivitas yang menyertakan internet didalamnya. Dalam definisi yang paling tegas *cyber sex* adalah suatu kombinasi antara komunikasi dan masturbasi yang merupakan suatu kepuasan seksual bagi seseorang.⁵ Tidak dipungkiri bahwa keberadaan *cyber sex* tidak terlepas dari bisnis internet sex. Permasalahan dengan munculnya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) yang termasuk dalam kategori tindak pidana baru, pada proses tahapan pembuktian dibutuhkan adanya alat bukti. Namun dengan adanya perluasan tentang alat bukti yang diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebutkan bahwa adanya alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/hasil cetaknya. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dalam memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena bahan hukum yang dijadikan sebuah referensi ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶ Penelitian ini difokuskan pada Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik.

¹ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 2

² Morcelino Brayen Sepang, "Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP", *Lex Crimen*, Vol.VII No.3 (Mei,2018).

³ Laila Mulansari, "Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam", *MMH*, Jilid 41 No.1 (Januari,2012). Hlm 4

⁴ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cybersex", *Jurnal Law Reform*, Volume 1 Nomor 1 (2005). hlm 179

⁵ Ria Anggraeni Utami, "Kebijakan Kriminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Bengkoelen Justice*, Vol 3 No.2 (2013). hlm 865

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana. hlm. 55–56.

Pembahasan

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik

KUHAP Indonesia mengatur tentang sistem dan teori-teori pembuktian dalam persidangan pidana. Sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia sama dengan sistem yang digunakan di Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental lainnya, yaitu sistem *inquisitorial*. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatif wettelejk*). Hal tersebut disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, alat bukti yang didalam ketentuannya menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada 2 (dua) alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya perkembangan teknologi maka informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang sah.

Tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik di Kabupaten Pidie pada tahun 2021 hanya terdapat satu putusan kasus tindak pidana kesusilaan di Pengadilan Negeri Sigli dengan nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Sgi. Bahwa terdakwa “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp5000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yaitu terpenuhinya unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara membuat 4 (empat) Grup Video Vulgar akun Telegram untuk calon costumer yang ingin mengakses video vulgar seharga Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu) sampai dengan Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yaitu: Keterangan saksi, Keterangan Ahli dan Barang bukti.

B. Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Terhadap Kejahatan Kesusilaan Melalui Media Elektronik

Seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik sesuai dengan UU ITE, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi menggunakan teleconference, microfilm, rekaman radio kaset, VCD (*Video Compact Disk*), atau DVD (*Digital Versatile Disk*), foto, faxmile, hasil rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*), bahkan SMS (*Short Message Service*),

atau MMS (*Multimedia Messaging Services*).⁷

Ketentuan pidana berdasarkan putusan No.82/Pid.Sus/2022/PN Sig dikaitkan berdasarkan kejahatan yang merusak kesusilaan di depan umum. Kejahatan tersebut telah diatur dalam pasal 282 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP merupakan tindak pidana menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Dilihat dari putusan No.82/Pid.Sus/2022/PN Sgi diatas alat bukti elektronik termasuk kedalam bukti elektronik yang berdiri sendiri yaitu dokumen elektronik berupa 1 (satu) buah Akun Telegram, 1 (Satu) buah Akun Ovo, 1 (Satu) Buah Akun Instagram, 1 (Satu) Buah Akun Email, (Dua) Buah screenshoot Bukti penerimaan Pulsa dan Ovo, (Empat) Buah screenshoot Group vulgar a.n Montok, Member vvip hijab, vip Barat&Jav dan vvip Special Campuran dan 8244 (Delapan ribu dua ratus empat puluh empat) Video Vulgar yang tersimpan di File-telegram-telegram Video yang disebar oleh terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari costumers.

Alat bukti elektronik dari kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik terhadap putusan No.82/Pid.Sus/2022/PN Sgi diatas menggunakan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri serta didukung dengan alat bukti lainnya dalam KUHP agar memenuhi syarat sah dalam sistem pembuktian yang digunakan yaitu dengan minimal 2(dua) alat bukti.

C. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Kejahatan *Cyber Sex*

Kejahatan *cyber sex* merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di era digital ini. Untuk meminimalisir kejahatan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, di antaranya:

1) Penyusunan undang-undang yang ketat.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE, diatur sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan *cyber sex*, yaitu pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp 12 miliar.

2) Pembentukan tim penegak hukum.

Pemerintah telah membentuk tim penegak hukum khusus yang bertugas untuk menangani kejahatan *cyber sex*. Tim ini terdiri dari aparat keamanan, jaksa, dan hakim yang memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam menangani kasus kejahatan *cyber sex*.

3) Peningkatan kesadaran masyarakat.

Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari kejahatan *cyber sex*. Pemerintah melalui berbagai lembaga dan instansi, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan kampanye dan penyuluhan terkait bahaya *cyber sex*.

4) Pembatasan akses.

Pemerintah juga melakukan pembatasan akses terhadap situs dan konten yang terkait dengan kejahatan *cyber sex* melalui kebijakan pemblokiran situs dan konten tertentu. Pembatasan akses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi filtering dan proxy.

5) Pelaporan dan tindakan cepat.

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan *cyber sex* yang terjadi dan menjamin bahwa tindakan cepat akan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pemerintah telah membentuk call center khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat

⁷ Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3. hlm.465.

untuk melaporkan kasus kejahatan *cyber sex*. Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir kejahatan *cyber sex*, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menangani masalah ini secara holistik.

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yaitu terpenuhinya unsur Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
2. Alat bukti elektronik dari kasus tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik terhadap putusan No.82/Pid.Sus/2022/PN Sgi menggunakan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri serta didukung dengan alat bukti lainnya dalam KUHAP agar memenuhi syarat sah dalam sistem pembuktian yang digunakan yaitu dengan minimal 2(dua) alat bukti.
3. Untuk meminimalisir kejahatan Cyber Sex, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, di antaranya: Penyusunan undang-undang yang ketat, Pembentukan tim penegak hukum, Peningkatan kesadaran masyarakat, Pembatasan akses, dan Pelaporan dan tindakan cepat.

Referensi

Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryan, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Adnan Paslydja, 1997, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PUSAT Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Agus Raharjo, 2007, *Kajian yuridis terhadap cyberporn dan upaya pencegahan serta penanggulangan penyebaran di Internet*. Purwokerto: UNSOED.
- Anton Saputra. 2012. "*Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi*". Bandar Lampung: UNILA.
- Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi suhariyanto, *tindak pidana teknologi informasi*, raja grafindo persada, Jakarta, 2018.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2011. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Semarang : Walisongo Press
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- H.Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hans Tangkau. 2012. "Hukum Pembuktian Pidana". Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Laras Astuti. 2015. *Kebijakan Formulasi Tentang Cyber sex yang Dilakukan oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: UII
- Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Bandung: Remadja Karya 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis. 2015. *Cyber pornography (pornografi dunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam*. Jakarta: UIN
- P.A.F.Lamintang, *DELIK-Delik Khusus*, sinar grafika, 2009, Jakarta
- R. Soesilo. 1981. *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Bandung: Politeia.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian hokum*. Jakarta: UII Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*". Jakarta : Rajawalipers
- W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Wiryo Projudikiro. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Dokumen Lain

- Bagus Wahyu R, *Peran Interpol Dalam Memberantas Sindikat Cybersex di Filipina 2012-2014*, Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 3 (2015).
- Budi Irawanto. 2017. "*Mereguk Kenikmatan di Dunia Maya Virtualitas Dan Penubuhan Dalam Cybersex*". Kawistara. Vol 7 Nomor 1.
- Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Bali.
- Grubbs, J, dkk. (2010). *The Cyber – Pornography Use Inventory : The Development of a New Assessment Instrument. Sexual Addiction & Compulsivity*. The Journal of Treatment & Prevention.17, 106 – 126.
- Hendra Sitio 2017 *Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia* (skripsi) UNNES
- Laila Mulansari. 2012. "*Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam*", MMH, Vol 41 Nomor 1.
- Morcelino Brayen Sepang. 2018. "*Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP*", Lex Crimen, Vol 7 Nomor 3.
- Pina Nurhandayani. 2017. "*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan (Cyber sex)*" Skripsi Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
- Ria Anggraeni Utami. 2013. "*Kebijakan Kriminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", Bengkoelen Justice, Vol 3 Nomor 2.
- Ramiyanto, 2017, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3
- Reimon Supusepa. 2011. "*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Berdasarkan Internet*". Jurnal Sasi. Vol 17 Nomor 4.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik